



Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo)

Christina Lee Alegre^{1*}, Usman², Victorson Taruh³

^{1,2,3} Program Study Akuntansi, Universitas Negeri Gorontalo – Indonesia

¹tinaalegre09@gmail.com, ²usmanpattivi@gmail.com, ³Victorsontaruh07846@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel

Tanggal Submit 14 Maret 2024

Tanggal revisi 27 Maret 2024

Tanggal Accepted 29 Maret 2024

Key words:

Utilization of Information Technology, Transparency, Village Government Performance and Accountability

DOI:

10.36805/akuntansi.v9i1.6427

Open access under Creative
Common Attribution-ShareAlike
(CC-BY-SA)



ABSTRACT

This research aims to examine the effect of the use of information technology and transparency on the performance of village government through accountability as an intervening variable in the village government of Kabila Bone sub-district, Bone Bolango district, Gorontalo province. The analysis tool in this research uses the SmartPLS version 3.0 software program which consists of evaluating the outer model and inner model. This research is included in descriptive research and is causal in nature. The population in this study was the Kabila Bone sub-district village government. Sampling in this study used a purposive sampling technique by categorizing the existing samples. So there were 54 respondents from all village officials in Kabila Bone sub-district. The results of this research show that the use of information technology does not have a positive and significant effect on village government performance with a significance level of $0.965 > 0.05$, so hypothesis I is rejected. Transparency has a positive and significant effect on village government performance with a significance level of $0.000 < 0.05$, so hypothesis II is accepted. Accountability has a positive and significant effect on village government performance with a significance level of $0.000 < 0.05$, so hypothesis III is accepted. The use of information technology has a positive and significant effect on village government performance with a significance level of $0.027 < 0.05$, so hypothesis IV is accepted. Transparency has a positive and significant effect on village government performance with a significance level of $0.000 < 0.05$, so hypothesis V is accepted. The use of technology on village government performance with accountability as an intervening variable with a significance level of $0.962 > 0.5$ means that hypothesis VI is rejected. Transparency towards village government performance with accountability as an intervening variable with a significance level of $0.000 < 0.05$ means hypothesis VII is accepted..

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan transparansi terhadap kinerja pemerintah desa melalui akuntabilitas sebagai variabel intervening pada pemerintah desa kecamatan kabila bone kabupaten bone bolango provinsi Gorontalo. Alat analisis pada penelitian ini menggunakan bantuan program software SmartPLS versi 3.0 yang terdiri dari evaluasi outer model dan inner model. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif dan bersifat kausal. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah desa kecamatan kabila bone. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan mengkategorikan sampel yang ada. sehingga didapatkan 54 responden dari seluruh aparat desa yang ada di kecamatan kabila bone. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa dengan tingkat signifikansi $0.965 > 0.05$ maka hipotesis I ditolak. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa dengan tingkat signifikansi $0.000 < 0.05$ maka hipotesis

II diterima. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa dengan tingkat signifikansi $0.000 < 0.05$ maka hipotesis III diterima. pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa dengan tingkat signifikansi $0.027 < 0.05$ maka hipotesis IV diterima. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa dengan tingkat signifikansi $0.000 < 0.05$ maka hipotesis V diterima. Pemanfaatan teknologi terhadap kinerja pemerintah desa dengan akuntabilitas akuntabilitas sebagai variabel intervening dengan tingkat signifikansi $0.962 > 0.5$ maka hipotesis VI ditolak. Transparansi terhadap kinerja pemerintah desa terhadap dengan akuntabilitas sebagai variabel intervening dengan tingkat signifikansi $0.000 < 0.05$ maka hipotesis VII diterima.

1. Pendahuluan

Sistem pemerintahan itu meliputi sentralisasi dan desentralisasi, sistem pemerintahan. Sentralisasi menurut Rira Nuradhwati (2019), sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah Kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Demikian juga Setyaningsih (2017), mengatakan sentralisasi adalah seluruh wewenang terpusat pada pemerintah pusat. Hal ini dikuatkan oleh Arie Elcaputera yang mengatakan bahwa menurut Elcaputera (2021), Sentralisasi adalah pemusatan semua kewenangan pemerintah baik bidang politik maupun administrasi dijalankan oleh pemerintahan pusat. Selain sistem sentralisasi dikenal juga sistem desentralisasi. Desentralisasi menurut Simandjuntak (2015), adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Juhaeni (2021), desentralisasi berarti pelimpahan kekuasaan/wewenang yang lebih luas kepada daerah.

Berdasarkan beberapa uraian yang telah dikemukakan berkaitan dengan sistem pemerintahan, maka dapat disimpulkan bahwa sentralisasi sebuah sistem pemerintahan yang dimana memusatkan seluruh wewenang kepada pimpinan atau atasan yang berada di posisi puncak. sedangkan desentralisasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang dimana seluruh wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah

Di Indonesia sistem yang digunakan adalah sistem desentralisasi yang dimana wewenang serta pertanggungjawaban dikembalikan ke daerah masing-masing. di Indonesia dengan sistem otonomi daerah maka berlaku berlaku desentralisasi dimana pengaturan administrasi pemerintahan diatur oleh pemerintah tersebut, termasuk dalam pemerintah desa. Pengelolaan pemerintahan desa didukung oleh dana yang diperoleh melalui alokasi dana desa dan dana desa serta pendapatan asli desa.

Penggunaan dana desa dimaksudkan untuk mencapai kinerja desa yang lebih baik dari status tertinggal, berkembang, maju dan mandiri. Hal ini penting karena kinerja desa yang baik. Menurut Bastian (2006), kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi suatu organisasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kumalasari & Widajantie (2022), Kinerja pemerintahan desa adalah ukuran yang mengungkapkan sejauh apa sasaran baik itu kualitas, kuantitas, waktu yang sudah diraih manajemen, yang mana sasaran atau targetnya itu telah ditetapkan lebih dulu.

Mengenai kinerja desa juga telah dikemukakan oleh Lajaba et al (2022), Kinerja perangkat desa adalah hasil kerja yang dicapai selama periode tertentu atau kemampuan yang dimiliki oleh perangkat desa untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan dengan tanggung jawab sehingga dapat tercapainya tujuan organisasi. Demikian juga Sinambela (2012), dalam hasil penelitiannya juga mengungkapkan kinerja adalah pelaksanaan dan

penyempurnaan pekerjaan tersebut sesuai dengan tanggung jawab sehingga dapat mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Dari beberapa uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah parameter atau suatu tolak ukur keberhasilan sebuah organisasi termasuk kinerja organisasi pemerintah desa yang ada di wilayah Kecamatan Kabila Bone. Dari data yang diperoleh dilapangan menunjukan bahwa (1) pemerintah desa tidak menyediakan sistem informasi yang lebih baik terhadap data dan program sehingga program tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat (2) pemerintah desa juga belum memiliki sistem pelaporan yang sesuai dengan standar informasi akuntansi, sehingga berdampak terhadap pengambilan keputusan organisasi desa (Merlan, 2021).

Menurut kajian yang dilakukan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan terdapat kelemahan dalam pelaksanaan kinerja pemerintah desa. Kelemahan tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman pemerintah desa terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik, lemahnya kemampuan sumber daya manusia aparatur desa, serta kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah dan masyarakat (Inspektorat.slemankab.go.id, 2018).

Berkaitan dengan fenomena yang telah dikemukakan maka penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa teori dan penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa. Hasil penelitian Lubis (2020), menyimpulkan Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa. kemudian penelitian yang dilakukan Lestari et al, (2020), menyimpulkan Kemampuan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa. Penelitian selanjutnya Menurut (Tarjo, 2020), menjelaskan bahwa aktivitas di desa yang semakin banyak, tidak mungkin untuk dilakukan secara manual, oleh karena itu perlu didukung adanya teknologi dan sekaligus pemanfaatannya agar kinerja maksimal. Memaksimalkan suatu pekerjaan akan terlihat dari keakuratan dan ketepatan hanya dapat dicapai dengan bantuan teknologi.

Tidak hanya pemanfaatan teknologi informasi, faktor selanjutnya yaitu transparansi. Menurut (Edowati et al., 2021) dalam penelitian menunjukkan Transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah Provinsi Bengkulu. Dalam hal ini, semakin tinggi tingkat transparansi pengelolaan keuangan maka kinerja pemerintah Provinsi Bengkulu juga akan semakin baik. Dalam hasil penelitian Suwanti & Hermanto (2020), bahwa transparansi berpengaruh positif serta signifikan terhadap kinerja pemerintah desa. demikian juga dengan penelitian Raja & Amanah (2021), yang menyatakan bahwa Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah pada SKPD Kota Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik transparansi maka kinerja pemerintah juga ikut meningkat. Begitu juga sebaliknya jika transparansi rendah maka kinerja pemerintah juga ikut menurun.

Dengan melihat hasil penelitian terdahulu, penulis tertarik membuktikan apakah ada atau tidaknya pengaruh variabel-variabel tersebut pada penelitian ini. Pemilihan variabel pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja pemerintah desa dilakukan karena teknologi informasi memiliki potensi untuk meningkatkan ekonomis efisien dan efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, pemerintah desa dapat meningkatkan aksesibilitas informasi bagi masyarakat, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan layanan publik. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi juga dapat membantu pemerintah desa dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara lebih efektif.

Selanjutnya Pemilihan variabel transparansi terhadap kinerja pemerintah desa dilakukan karena transparansi dianggap sebagai salah satu faktor kunci yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah desa secara keseluruhan. Dengan adanya transparansi,

masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi kegiatan serta pengelolaan anggaran pemerintah desa secara lebih efektif. Transparansi juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, yang pada gilirannya dapat memperkuat legitimasi pemerintah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa.

Berhubungan juga variabel-variabel tersebut masih ada hasil yang belum konsisten pada penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini yang membuat penulis ingin menggali lebih dalam lagi alasan variabel tersebut berpengaruh atau tidak mempengaruhi Kinerja pemerintah desa. Serta belum adanya kombinasi dari kedua variabel tersebut serta dengan menambahkan satu variabel akuntabilitas sebagai variabel intervening dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Berdasarkan fenomena dan latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan suatu kajian penelitian dengan formulasi judul "Pengaruh pemanfaatan teknologi dan transparansi terhadap akuntabilitas serta implikasinya pada kinerja pemerintah desa"

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Teori Stewardship

Menurut (Suwanti & Hermanto, 2020) bahwa teori stewardship menjelaskan eksistensi pemerintah desa sebagai salah satu lembaga pemerintah yang dapat dipercaya menampung aspirasi masyarakat, dapat juga memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, mampu membuat pertanggungjawaban keuangan yang telah diamanahkan kepadanya, sehingga terciptanya tujuan dari ekonomi yang terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

Dengan demikian Teori Stewardship adalah teori yang sesuai dalam penelitian ini dimana setiap aparatur desa baik itu kepala desa maupun aparatur desa yang membantunya memiliki tujuan yang sama dimana memiliki tujuan untuk memperbaiki desa guna mensejahterakan masyarakat yang tergambar dalam Teori Stewardship. Implikasi teori Stewardship pada pemerintah desa sebagai organisasi yang dapat dipercaya dalam menampung aspirasi masyarakat dengan cara memberikan pelayanan yang baik sehingga dapat tercapai tujuan yang diinginkan yaitu pemanfaatan teknologi informasi yang baik, transparan dan akuntabilitas dalam kinerja pemerintahan desanya.

2.2 Teori Technology Acceptance Model

Model penerimaan teknologi (*Technology Acceptance Model*, TAM) merupakan salah satu model yang dibangun untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya penggunaan teknologi komputer. Teori Technology Acceptance Model memberikan sebuah asumsi tentang bagaimana sebuah teknologi dapat bermanfaat bagi sumber daya manusia dalam melakukan tugasnya sehingga tugas yang dijalankan memiliki hasil yang lebih efektif dan efisien Sulfiana Mursalim dan Muh. Su'un (2022).

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa *Technology Acceptance Model* adalah adalah suatu model untuk memprediksi dan menjelaskan bagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi yang berkaitan dengan pekerjaan pengguna. Dengan kata lain, semakin tinggi persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan, semakin besar kemungkinan seseorang untuk menerima dan mengadopsi teknologi.

2.3 Pemanfaatan teknologi informasi

Pemanfaatan pemanfaatan teknologi menurut Nasir & Oktari (2011), yaitu perilaku/sikap akuntan menggunakan Pemanfaatan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Demikian juga menurut Indraswari & Rahayu (2021), yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi merupakan suatu teknologi yang berupa *hardware*, *software* dan *useware* dimana komponen tersebut digunakan dengan tujuan untuk mengolah

suatu data agar mendapatkan informasi yang berkualitas yaitu informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu.

Dari beberapa uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi seperangkat alat ataupun perangkat yang dipergunakan untuk mempermudah pekerjaan baik dalam memproses menyusun maupun menyimpan informasi. Indikator pemanfaatan teknologi informasi menurut Muslihudin dan Oktafianto (2016:41) adalah *hardware*, *software*, jaringan dan manusia.

2.4 Transparansi

Transparansi menurut (Suwanti & Hermanto, 2020) yaitu keterbukaan pemerintah kepada masyarakat untuk mengakses informasi berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah tersebut. Demikian juga menurut (Usman et al., 2022), yang menyatakan bahwa Hak yang dimiliki oleh masyarakat luas atau publik untuk mengetahui informasi tentang pengelolaan dana desa serta kebijakan yang dilakukan secara terbuka.

Dari beberapa uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara harus dapat diakses secara terbuka dengan memberi ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara luas di dalamnya. Indikator transparansi menurut Mardiasmo (2009:19) adalah Informatif (Informative), Keterbukaan (Openness), Pengungkapan (Disclosure).

2.5 Akuntabilitas

Akuntabilitas menurut Suwanti & Hermanto (2020), yaitu elemen terpenting dalam rangka terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik, bentuk perwujudan atas kewajiban suatu instansi pemerintah yaitu dengan mempertanggungjawabkan seluruh keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dipercayakan oleh pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja dan laporan keuangan pemerintah yang telah disusun secara periodik. Demikian juga menurut (Usman et al., 2022), tidak hanya sekedar untuk mencari kesalahan-kesalahan namun untuk mengetahui kejadian sesungguhnya dan bisa mempertanggungjawabkannya agar kedepannya bisa diperbaiki lagi.

Dari beberapa uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban mulai dari proses pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan serta mengungkapkan segala aktivitas yang sekiranya harus dilaporkan dari pihak yang diberikan kepada pihak pemegang amanah kepada pihak yang memberikan amanah. Permendagri Nomor 20 tahun 2018 menunjukkan terdapat 6 (enam) komponen dalam pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel dengan meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

2.6 Kinerja Pemerintah Desa

Kinerja pemerintah desa adalah tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsinya, kemampuan daerah dalam menjalankan, mengelola dan mengendalikan sumber daya daerahnya dengan baik dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat sehingga terwujudnya proses pencapaian tujuan (Suwanti & Hermanto, 2020). Demikian juga menurut Wahyudi et al (2022), menyatakan bahwa kinerja yaitu seseorang yang memberikan kontribusi dari segi kuantitas dan kualitas output dari pekerjaan yang mereka lakukan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan organisasi dalam upaya mencapai visi, misi,

dan tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

Dari beberapa uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan, serta visi misi pemerintah desa/organisasi yang telah ditentukan. Indikator kinerja pemerintah desa menurut (Umaro et al., 2020) Ekonomis efisiensi dan efektivitas

3. Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk membuktikan uji hipotesis penelitian yang menganalisis pengaruh antara variabel bebas (X) variabel terikat (Y) melalui variabel intervening (Z), di mana dalam penelitian ini variabel (X1) Pemanfaatan Teknologi informasi dan (X2), Kinerja pemerintah desa (Y) dan variabel (Z) akuntabilitas. Lokasi penelitian ini adalah 9 Desa yang ada di kecamatan kabila bone kabupaten bone bolango provinsi gorontalo. Objek penelitian ini adalah pemanfaatan teknologi informasi dan transparansi terhadap kinerja pemerintah desa melalui akuntabilitas di seluruh desa yang ada di kecamatan kabila bone kabupaten bone bolango provinsi gorontalo.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi yang diteliti pada penelitian ini adalah pemerintah desa kecamatan kabila bone kabupaten bone bolango. Studi ini menggunakan purposive sampling dengan pengambilan sampel menggunakan pertimbangan tertentu. Adapun yang dijadikan sampel oleh peneliti dengan menggunakan kriteria yaitu terdapat 6 orang untuk setiap desanya antara lain adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua BPD, Kasi Kesra, serta Kepala Dusun desa yang ada di Kecamatan Kabila Bone. Peneliti mengambil 6 sampel pada setiap desa sehingga jumlah responden pada penelitian ini berjumlah 54 responden dari 9 desa yang ada di kecamatan kabila bone.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memakai data kuantitatif yang bersumber dari data primer sebagai dasar analisis dan interpretasi. Strategi pengumpulan data terkadang melibatkan penyebaran kuesioner, dimana responden diberikan pertanyaan tertulis dan diharapkan memberikan balasan tertulis sebagai balasannya. Kuesioner menggunakan skala Likert untuk menilai variabel yang diidentifikasi oleh peneliti. Pada studi ini, peneliti memakai skala Likert ordinal.

3.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisa yang akan dipergunakan adalah Analisis Partial Least Square (PLS). Penggunaan metode PLS pada penelitian ini didasari dengan kegiatan pengujian yang dilakukan berkaitan dengan hubungan antar satu atau lebih variabel independen dan variabel dependen.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Model Pengukuran (Outer Model)

Rule of thumb yang umumnya digunakan untuk menilai *convergent validity* menurut Hair et al (2011), Henseler et al (2009) yaitu nilai *loading* faktor $> 0,7$. Sedangkan menurut pendapat lainnya yaitu menurut Chin (1998) nilai *loading* faktor $\geq 0,5$ dapat diterima (Yamin, 2021). Pengujian *convergent validity* dalam penelitian ini merujuk pada Hair et al. (2011), Henseler et al. (2009) dimana nilai *loading* faktor $> 0,7$. Selain itu pengujian *convergent validity* juga dievaluasi dari hasil nilai Average Variance Extracted (AVE). Menurut Ghazali dalam Sugistianto dan Ispriyahadi (2021) jika memiliki nilai AVE (Average Variance Extranced) diatas

0,5 atau menunjukkan keseluruhan outer loading dimensi variabel memiliki nilai loading > 0,5 maka indikator dianggap valid sehingga memenuhi kriteria convergent validity.

Tabel 1. Hasil Outer Loading

Variabel	Indikator	Item	Loading Faktor	AVE	Ket
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X1)	Hardware	PTI1	0.758	0,590	Valid
		PTI2	0.817		
		PTI3	0.742		
	Software	PTI4	0.809		
		PTI5	0.762		
	Jaringan	PTI6	0.739		
		PTI7	0.794		
	Manusia	PTI8	0.764		
		PTI9	0.720		
Transparansi (X2)	informatif	T1	0.757	0,587	Valid
		T2	0.717		
		T3	0.797		
		T4	0.735		
		T5	0.731		
	Keterbukaan	T6	0.786		
		T7	0.753		
		T8	0.791		
		T9	0.783		
	Pengungkapan	T10	0.807		
		KPD1	0.760		
	Ekonomis	KPD2	0.748		
		KPD3	0.793		
		KPD4	0.758		
		KPD5	0.796		
		KPD6	0.777		
Kinerja Pemerintah Desa (Z)	Efisien	KPD7	0.750	0,587	Valid
		KPD8	0.810		
		KPD9	0.744		
		KPD10	0.770		
		KPD11	0.729		
	Efektivitas	KPD12	0.801		
		KPD13	0.753		
		KPD14	0.750		
		KPD15	0.749		
	Perencanaan	A1	0.823		
		A2	0.813		
		A3	0.798		
	Pelaksanaan	A4	0.792		
		A5	0.796		
Akuntabilitas (Y)	Penatausahaan	A6	0.733	0,619	Valid
		A7	0.784		
		A8	0.778		
	Pertanggungjawaban	A9	0.812		
		A10	0.799		
		A11	0.785		

Pengawasan	A12	0.810
	A13	0.761
	A14	0.720

Sumber : Output SmartPLS 3, 2024

Berdasarkan tabel diatas indikator dari variabel Pemanfaatan teknologi informasi, transparansi, kinerja pemerintah desa dan akuntabilitas memiliki nilai outer loading > 0,7. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh indicator tersebut dapat diterima atau layak untuk digunakan dalam penelitian dan dapat dilakukan analisis lebih lanjut. Setelah dilakukan pengujian menunjukan bahwa nilai AVE > 0,5. Sehingga semua indikator memiliki nilai yang memenuhi Convergent Validity.

4.3.1 Discriminant Validity

Pengujian *discriminant validity* menggunakan *Cross loading*

Pengujian *discriminant validity* menggunakan nilai *cross loading* dilakukan dengan cara melihat nilai *cross loading* untuk setiap variabel harus >0,7 (Ghozali & Latan, 2015).

Tabel 2 Hasil Nilai Cross Loading

Indikator	Pemanfaatan teknologi informasi	Transparansi	Kinerja Pemerintah Desa	Akuntabilitas
PTI1	0.758	0.665	0.658	0.577
PTI2	0.817	0.634	0.598	0.508
PTI3	0.742	0.685	0.661	0.649
PTI4	0.809	0.580	0.536	0.492
PTI5	0.762	0.716	0.650	0.601
PTI6	0.739	0.727	0.718	0.670
PTI7	0.794	0.612	0.589	0.525
PTI8	0.764	0.729	0.709	0.659
PTI9	0.720	0.599	0.564	0.453
T1	0.690	0.757	0.690	0.670
T2	0.640	0.717	0.668	0.640
T3	0.686	0.797	0.755	0.774
T4	0.635	0.735	0.756	0.694
T5	0.680	0.731	0.687	0.630
T6	0.608	0.786	0.793	0.825
T7	0.634	0.753	0.756	0.687
T8	0.722	0.791	0.729	0.655
T9	0.672	0.783	0.711	0.719
T10	0.711	0.807	0.761	0.799
KPD1	0.630	0.694	0.760	0.698
KPD2	0.596	0.711	0.748	0.688
KPD3	0.665	0.727	0.793	0.752
KPD4	0.585	0.723	0.758	0.721
KPD5	0.634	0.753	0.796	0.724
KPD6	0.706	0.757	0.777	0.696
KPD7	0.622	0.706	0.750	0.683
KPD8	0.691	0.759	0.810	0.772

KPD9	0.802	0.731	0.744	0.633
KPD10	0.629	0.774	0.770	0.806
KPD11	0.581	0.656	0.729	0.685
KPD12	0.587	0.729	0.801	0.743
KPD13	0.597	0.735	0.753	0.769
KPD14	0.605	0.715	0.750	0.720
KPD15	0.638	0.796	0.749	0.726
A1	0.715	0.801	0.805	0.823
A2	0.617	0.760	0.713	0.813
A3	0.580	0.722	0.730	0.798
A4	0.678	0.768	0.752	0.792
A5	0.547	0.716	0.715	0.796
A6	0.618	0.709	0.759	0.733
A7	0.577	0.697	0.750	0.784
A8	0.577	0.682	0.720	0.778
A9	0.520	0.715	0.738	0.812
A10	0.514	0.704	0.749	0.799
A11	0.621	0.762	0.773	0.785
A12	0.568	0.750	0.711	0.810
A13	0.605	0.719	0.690	0.761
A14	0.564	0.723	0.761	0.720

Sumber : Output SmartPLS 3, 2024

Hasil pengujian *discriminant validity* pada tabel 2 menunjukkan *cross loading* dari setiap indikator variabel laten Pemanfaatan teknologi, transparansi, akuntabilitas dan kinerja pemerintah desa diatas nilai *cross loading* dari variabel laten lainnya. Semua memiliki nilai *cross loading* > 0,7 sehingga instrumen penelitian dinyatakan valid secara diskriminan.

4.3.2 Uji Reliabilitas

Pengujian *reliabilitas* ini, peneliti menguji nilai *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha* untuk menilai ketergantungan variabel yang diteliti. Suatu variabel dapat dianggap dapat reliabel jika mempunyai nilai > 0,6 dan *Composite Reliability* > 0,7. Tabel di bawah menampilkan hasil pengujian *Composite Reliability* dan *Alpha Cronbach's Alpha*.

Tabel 3. Hasil Nilai Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Keterangan
Pemanfaatan teknologi informasi	0,913	0,928	Reliabel
Transparansi	0,922	0,934	Reliabel
Kinerja Pemerintah Desa	0,950	0,955	Reliabel
Akuntabilitas	0,952	0,958	Reliabel

Sumber : Output SmartPLS 3, 2024

Berdasarkan tabel diatas, variabel pemanfaatan teknologi informasi dapat dikatakan *reliabel* karena nilai *cronbach's Alpha* dari variabel tersebut adalah sebesar 0,913 > 0.6 dan nilai *Composite Reliability* dari variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,928 > 0.7. Variabel Transparansi dapat dikatakan reliabel karena nilai *cronbach's Alpha* dari variabel tersebut adalah

sebesar $0,922 > 0.6$ dan nilai *Composite Reliability* dari variabel Transparansi sebesar $0,934 > 0.7$. Variabel kinerja pemerintah desa dapat dikatakan *reliabel* karena nilai *cronbach's Alpha* dari variabel tersebut adalah sebesar $0,950 > 0.6$ dan nilai *Composite Reliability* dari variabel pengelolaan dana desa sebesar $0,955 > 0.7$. Variabel Akuntabilitas dapat dikatakan reliabel karena nilai *cronbach's Alpha* dari variabel tersebut sebesar $0,952 > 0.6$ dan nilai *Composite Reliability* dari variabel akuntabilitas sebesar $0,958 > 0.7$.

4.2 Model Struktural (Inner Model)

4.2.1 Koefisien Determinasi (R-Square)

Pengujian *R-square* di dalam model struktural dipakai untuk menilai konstruk dependen. Pengujian ini untuk menilai seberapa besar konstruk endogen dapat dijelaskan oleh konstruk eksogen.

Tabel 4. Hasil Nilai R-Square

Variabel	R Square
Kinerja Pemerintah Desa (Z)	0,937
Akuntabilitas (Y)	0,877

Sumber : Output SmartPLS 3, 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai *R-square* variabel kinerja pemerintah desa sebesar 0,937 atau 93%. Nilai tersebut mengindikasi jika variabel Kinerja Pemerintah Desa dapat dijelaskan oleh variabel pemanfaatan teknologi dan transparansi sebesar 93% dan sisanya 7% dipengaruhi oleh variabel laten lain yang tidak terdapat dalam penelitian. Sedangkan nilai *R-square* untuk variabel Akuntabilitas sebesar 0,877 atau 87%. Nilai tersebut mengindikasikan jika variabel akuntabilitas dapat dijelaskan oleh pemanfaatan teknologi informasi dan transparansi sebesar 87% dan sisanya 13% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian.

4.2.2 Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis ditempuh dengan melihat hasil uji secara parsial untuk masing-masing variabel. Untuk melihat apakah suatu hipotesis itu dapat diterima atau ditolak diantaranya dengan memperhatikan nilai signifikansi antar konstruk, t-statistik, dan p-values. Dengan nilai t-statistik yang digunakan harus lebih besar dari 1,96 dan p-values harus lebih kecil dari 0,05.

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis

	Sampel Asli (O)	T Statistik (O/STDEV)	P Values	Ket
Hubungan Langsung				
Pemanfaatan teknologi informasi → Akuntabilitas	0.003	0.040	0.965	Tolak
Transparansi → Akuntabilitas	0.953	13.674	0.000	Terima
Akuntabilitas → Kinerja Pemerintah Desa	0.627	5.169	0.000	Terima
Pemanfaatan Teknologi informasi → Kinerja Pemerintah Desa	-0.224	2.277	0.027	Terima
Transparansi → Kinerja Pemerintah Desa	0.526	3.930	0.000	Terima
Hubungan Tidak Langsung				

Pemanfaatan teknologi informasi → akuntabilitas → kinerja pemerintah desa	0.002	0.047	0.962	Tolak
Transparansi → Akuntabilitas → Kinerja Pemerintah Desa	0.597	4.782	0.000	Terima

Sumber : Output SmartPLS 3, 2024

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan dimana diperoleh hasil yakni t-statistik $0.040 > 1,96$ dan P Values $0.968 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas sehingga Hipotesis pertama ditolak. Penelitian ini membuktikan bahwa tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Pahlawan et al (2020) yang menyatakan bahwa Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dapat disebabkan oleh kurangnya perangkat pengolah laporan keuangan atau perangkat komputer yang digunakan oleh aparatur desa dalam mengolah dan melaporkan laporan keuangan dana desa. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dapat disebabkan oleh hardware, software, jaringan serta sumber daya manusia yang digunakan oleh aparatur desa dalam menerapkan akuntabilitas yang kurang. Demikian pula dari sisi software aplikasi yang digunakan tentang siskudes masih terbilang rumit dan terkadang mengalami error pada system, sedangkan dari sisi jaringan sering mengalami gangguan dan dari sisi sumber daya manusia belum memadai dalam mengoperasikan teknologi informasi yang tersedia.

4.3.2 Transparansi Terhadap Akuntabilitas

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan dimana diperoleh hasil yakni t-statistik $13.674 > 1,96$ dan P Values $0.000 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel transparansi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas sehingga Hipotesis kedua diterima. Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara transparansi terhadap akuntabilitas. Transparansi merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan akuntabilitas. Sehingga semakin tinggi variasi transparansi maka akuntabilitas akan semakin efektif, dengan demikian transparansi sangat berpengaruh terhadap peningkatan akuntabilitas dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Herlina et al (2021) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dikarenakan Sehingga semakin baiknya transparansi maka akan semakin meujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang baik pula.

4.3.3 Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah Desa

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan dimana diperoleh hasil yakni t-statistik $5.169 > 1,96$ dan P Values $0.000 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa sehingga Hipotesis ketiga diterima. Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah desa. Akuntabilitas merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa. Sehingga semakin tinggi variasi akuntabilitas maka kinerja pemerintah desa akan semakin efektif, dengan demikian akuntabilitas sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Hasil penelitian ini

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari (2020) menyatakan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja aparatur. Semakin akuntabilitas publik dilaksanakan maka kinerja aparatur pemerintah akan semakin meningkat.

4.3.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Pemerintah Desa

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan dimana diperoleh hasil yakni t-statistik $2.277 > 1,96$ dan P Values $0.027 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa sehingga Hipotesis keempat diterima. Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pemanfaatan teknologi terhadap kinerja pemerintah desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Penelitian ini sejalan dengan teori Damayanti, (2017) yang mengemukakan bahwa teknologi informasi selain berfungsi sebagai teknologi komputer (hardware and software) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga memiliki fungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyampaian dan penyebaran informasi. Dengan adanya penerapan pemanfaatan teknologi informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo maka kinerja instansi juga dapat berjalan dengan baik.

4.3.5 Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Desa

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan dimana diperoleh hasil yakni t-statistik $3.930 > 1,96$ dan P Values $0.000 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel transparansi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa sehingga Hipotesis kelima diterima. Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara transparansi terhadap akuntabilitas. Transparansi merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan akuntabilitas. Sehingga semakin tinggi variasi transparansi maka akuntabilitas akan semakin efektif, dengan demikian transparansi sangat berpengaruh terhadap peningkatan akuntabilitas dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Novya Nurul Istiqomah (2017) yang menyatakan bahwa Transparansi merupakan salah satu hak yang diberikan kepada masyarakat atas informasi yang diberikan pemerintah terhadap perencanaan program serta kebijakan hingga proses pelaksanaannya. Sehingga dengan adanya transparansi masyarakat mampu menilai seberapa besar peran pemerintah dalam pembangunan dan pemberdayaan melalui pengelolaan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4.3.6 Pemanfaatan Teknologi Informasi Melalui Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah Desa

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan dimana diperoleh hasil yakni t-statistik $4.782 > 1,96$ dan P Values $0.000 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki tidak pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa melalui akuntabilitas sehingga Hipotesis keenam ditolak. Penelitian ini membuktikan bahwa tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pemanfaatan teknologi informasi kinerja pemerintah desa melalui akuntabilitas. Pemanfaatan teknologi informasi yang tidak berdampak positif terhadap kinerja pemerintah desa melalui akuntabilitas dapat menyebabkan berbagai implikasi yang merugikan. Tanpa adanya penerapan yang efektif dan tepat dalam penggunaan teknologi informasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi terganggu.

4.3.7 Transparansi Melalui Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah Desa

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan dimana diperoleh hasil yakni t-statistik $0.040 > 1,96$ dan P Values $0.968 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah desa melalui akuntabilitas sehingga Hipotesis ketujuh ditolak. Penelitian ini membuktikan bahwa tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja pemerintah desa melalui akuntabilitas. Peningkatan transparansi dalam operasi pemerintahan desa memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja pemerintah desa melalui peningkatan tingkat akuntabilitas. Ketika pemerintah desa menjalankan tugasnya dengan transparan, hal itu menciptakan lingkungan dimana informasi terkait anggaran, keputusan, dan kebijakan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah desa dengan akuntabilitas sebagai variabel intervening dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas, Hal ini bermakna bahwa pemerintah desa belum memanfaatkan keunggulan dari teknologi informasi dalam pengelolaan data dengan menunjang kinerja pemerintahan secara tepat dan cepat. transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa, hal ini bermakna bahwa transparansi yang kuat membantu mendorong tanggung jawab dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa hal ini bermakna bahwa semakin baik bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, maka semakin baik pula pemerintah dalam melaksanakan kinerjanya pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa., hal ini bermakna bahwa Dengan adanya penerapan pemanfaatan teknologi informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo maka kinerja instansi juga dapat berjalan dengan baik. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa hal ini bermakna bahwa Dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat terhadap informasi-informasi tersebut, pemerintah desa menciptakan kesempatan bagi kontrol sosial, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan membangun kepercayaan yang lebih besar. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa melalui akuntabilitas sebagai variabel intervening., hal ini bermakna bahwa Pemanfaatan teknologi informasi yang tidak berdampak positif terhadap kinerja pemerintah desa melalui akuntabilitas dapat menyebabkan berbagai implikasi yang merugikan. Tanpa adanya penerapan yang efektif dan tepat dalam penggunaan teknologi informasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi terganggu. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa melalui akuntabilitas sebagai variabel intervening., hal ini bermakna bahwa dampak yang signifikan terhadap kinerja pemerintah desa melalui peningkatan tingkat akuntabilitas. Ketika pemerintah desa menjalankan tugasnya dengan transparan, hal itu menciptakan lingkungan dimana informasi terkait anggaran, keputusan, dan kebijakan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

5.2 Saran

Bagi pihak pemerintah desa diharapkan untuk melakukan pengembangan pemanfaatan teknologi dan transparansi yang lebih lanjut sehingga akan meningkatkan kemampuan dan keahlian aparat dalam kinerja pemerintah desa. selain itu, pemanfaatan teknologi dan

transparansi juga dapat menjadi pendorong untuk memastikan integritas dalam pelaporan keuangan. Kemudian dengan meningkatkan kinerja pemerintah desa yang ada dan mengimplementasikan mekanisme kinerja yang efektif sehingga membantu mengurangi risiko kesalahan dan kecurangan yang kemudian berdampak baik pada kualitas informasi yang dihasilkan.

Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian, tidak hanya terbatas pada satu Kecamatan saja, melainkan beberapa Kecamatan sehingga data yang diperoleh lebih luas dan bervariasi, sehingga dapat lebih memperkuat hasil penelitian.

Kesimpulan, menjawab tujuan penelitian serta menjelaskan implikasi, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya. Implikasi merupakan dampak praktis dari hasil penelitian. Keterbatasan penelitian memuat aspek yang perlu diperbaiki untuk penelitian selanjutnya sekaligus menjadi saran untuk penelitian selanjutnya. Kesimpulan dituliskan dalam bentuk paragraph dan tidak menjelaskan angka statistic.

Kesimpulan, menjawab tujuan penelitian serta menjelaskan implikasi, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya. Implikasi merupakan dampak praktis dari hasil penelitian. Keterbatasan penelitian memuat aspek yang perlu diperbaiki untuk penelitian selanjutnya sekaligus menjadi saran untuk penelitian selanjutnya. Kesimpulan dituliskan dalam bentuk paragraph dan tidak menjelaskan angka statistic.

Kesimpulan, menjawab tujuan penelitian serta menjelaskan implikasi, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya. Implikasi merupakan dampak praktis dari hasil penelitian. Keterbatasan penelitian memuat aspek yang perlu diperbaiki untuk penelitian selanjutnya sekaligus menjadi saran untuk penelitian selanjutnya. Kesimpulan dituliskan dalam bentuk paragraph dan tidak menjelaskan angka statistic.

Daftar Pustaka

- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Edowati, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai. *Indonesian Journal of Business and Management*, 4(1), 87-96. <https://doi.org/10.35965/jbm.v4i1.1184>
- Elcaputera, A. (2021). Kewenangan Pengawasan Pemerintah Provinsi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten / Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 6(1), 22-38.
- Hair, Joseph & Ringle, Christian & Sarstedt, Marko. (2011). PLS-SEM: Indeed a silver bullet. *The Journal of Marketing Theory and Practice*. 19. 139-151. 10.2753/MTP1069-6679190202.
- Indraswari, N. E., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa , Partisipasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1-15.
- Juhaeni. (2021). SENTRALISASI DAN DESENTRALISASI DALAM MANAJEMEN MADRASA IBTIDAIYAH. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., 3(2), 2013-2015.
- Jorg Henseler et al (2009), *The Use Of Partial Least Squares Path Modeling In International Marketing*, New Challenges to International Marketing, *Advances in International Marketing*, Volume 20, 277-319, Copyright © 2009 by Emerald Group Publishing Ltd., 2009.
- Kumalasari, D. R., & Widajantie, T. D. (2022). Pengaruh Kompetensi, Akuntabilitas, Pengendalian Internal dan Partisipasi Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Desa Kebalandono. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(2), 1116. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i2.2318>
- Lajaba, P. D. Y., Halim, M., & Aspirandi, R. M. (2022). Systematic Literature Review: Aplikasi Siskeudes Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Dan Kinerja Perangkat

- Desa. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 8(2), 66-76.
<https://doi.org/10.38204/jrak.v8i2.799>
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Nasir, A., & Oktari, R. (2011). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar). *Jurnal Ekonomi*, 19(02), 1-14.
- Raja, T. S. M., & Amanah, L. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(3), 1-18.
<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/97>
- Setyaningsih, K. (2017). Esensi Tranformasi Sistem Sentralisasi-Desentralisasi Pendidikan Dalam Pembangunan Masyarakat. *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3 (1), 76-94.
- Simandjuntak, R. (2015). Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 7(1), 57-67.
<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3512>
- Suwanti, S., & Hermanto, S. B. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Kinerja Keuangan Pemerintah Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa. *Jurnal Ilmu Dan ...*, 1-21.
<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/3621/3637>
- Tarjo. (2020). Pengaruh Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 1(1), 9-25.
<https://doi.org/10.36778/jesya.v1i1.7>
- Umara, S., Deviyanti, D. R., & ... (2020). Analisis penilaian kinerja berdasarkan value for money pada desa sawit jaya kecamatan long ikis kabupaten paser. *Jurnal Ilmu Akuntansi*
<http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIAM/article/view/5503>
- Usman, Mahfiza, & Lamusi, M. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa di Gorontalo. *Al - Buhuts*, 18, 517-528.
- Wahyudi, D., Marantika, A., & Yusup, Y. (2022). Pengaruh Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, Dan Fasilitas Kantor Terhadap Kinerja Perangkat Desa Di Kecamatan Kampar. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 887-898. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.658>